

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara, studi literatur serta pengamatan yang dilakukan selama penelitian, serta berdasarkan hasil analisis yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dinilai cukup efektif dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaporkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat selama satu tahun anggaran. Hal ini diukur dari beberapa dimensi, antara lain:
  - a. Pencapaian Tujuan

Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) telah ditetapkan sesuai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan SILPPD adalah membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyampaikan LPPD beserta data dukung masing-masing Urusan Pemerintahan serta memudahkan Tim Reviu untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam mewujudkan LPPD Provinsi NTT yang berkualitas. Selain menghasilkan LPPD yang berkualitas, SILPPD juga memudahkan Penyampaian LPPD secara cepat, akurat, hemat dan

tepat waktu yakni sebelum 31 Maret setelah tahun anggaran berakhir. Dengan mengetahui keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi NTT yang dilaporkan dalam LPPD, aplikasi SILPPD telah menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memonitor urusan pemerintahan. Aplikasi ini juga bisa memonitor tujuan desentralisasi dari aspek pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan di Provinsi NTT dan sebagai bahan pembinaan oleh pemerintah pusat.

Pencapaian tujuan LPPD Provinsi NTT yang berkualitas ini dapat terwujud karena telah melalui tahapan-tahapan sesuai sistematika pelaporan dan substansi pelaporan. Sebelum mengunggah dokumen LPPD pada SILPPD Tim Penyusun pada Biro Pemerintahan mengumpulkan data dan dokumen pendukung yang dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data dari perangkat daerah pelaksana urusan, tahap penyusunan dokumen LPPD, tahap verifikasi data yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Provinsi NTT serta tahap proses scan data untuk diunggah pada SILPPD dalam bentuk file PDF. Proses unggah diawali dengan Log in pada website <https://elppd.kemendagri.go.id>: menggunakan *username* dan *password* tim penyusun, kemudian pilih menu 'LPPD' untuk Pelaporan LPPD mulai dari Bab1, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab

V serta menu “IKK: untuk Pelaporan data dukung Indikator Kinerja Kunci yang telah discan pdf.

b. Integrasi

Tingkat kemampuan tim penyusun, tim reviu maupun perangkat daerah dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi terhadap penerapan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) dinilai cukup baik, tetapi belum berjalan maksimal. Dalam proses integrasi, Pemahaman Tim Penyusun tentang penggunaan SILPPD telah diperoleh melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring. Sedangkan pemahaman Tim Reviu tentang tahapan verifikasi dan penilaian dokumen LPPD pada SILPPD hanya merujuk pada buku pedoman reviu LPPD yang diterbitkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun pemahaman Perangkat Daerah terhadap SILPPD telah diperoleh melalui bimbingan teknis (bimtek) penyusunan LPPD yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Provinsi NTT. Namun kendala yang dihadapi adalah bimtek yang dilakukan hanya diselenggarakan pada tahun 2020 karena keterbatasan anggaran sedangkan LPPD wajib disampaikan setiap tahun, sehingga apabila terjadi mutasi atau pergantian pejabat yang menangani LPPD, maka penyusunan LPPD dilakukan oleh ASN yang berbeda pada saat bimtek.

c. Adaptasi

Proses penyesuaian penerapan SILPPD untuk menyelaraskan antara Tim Penyusun, Tim Pereviu serta Perangkat Daerah pelaksana urusan terhadap perubahan penyampaian LPPD secara online menggunakan aplikasi SILPPD dinilai cukup baik, namun masih belum berjalan optimal. Proses adaptasi berupa peningkatan kemampuan terlihat dari kecepatan dan ketepatan waktu Pelaporan LPPD dan Penginputan Data Dukung IKK pada SILPPD. Dengan menggunakan akun Tim Penyusun, data yang diserahkan Perangkat Daerah diunggah pada SILPPD. Selain Tim Penyusun, kemampuan adaptasi Tim Pereviu juga dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan tim reviu dalam proses verifikasi dan penilaian data dasar yang telah diunggah pada aplikasi SILPPD menggunakan akun Tim Reviu, yang dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR). Hal ini diperkuat dengan kemampuan adaptasi perangkat daerah pelaksana urusan yang semula mengumpulkan LPPD dan data dukung dalam bentuk hardcopy, kini mengumpulkan data dalam bentuk scan pdf. Data dapat dikumpulkan secara lengkap, utuh dan akurat karena didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai yakni komputer, jaringan internet dan alat scanner yang baik.

2. Faktor-Faktor yang menghambat keberhasilan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain:

Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- a. Keterlambatan Waktu Penyerahan Data Dasar LPPD Perangkat Daerah untuk diunggah pada SILPPD
- b. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun LPPD dan Menyiapkan Data Dukung di SILPPD
- c. Keterbatasan Data/Informasi kinerja urusan dari Perangkat Daerah untuk diunggah pada SILPPD
- d. Lemahnya koordinasi antara Tim Penyusun, Tim Reviu dan Perangkat Daerah

## **6.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penerapan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- a. Pencapaian Tujuan

Dalam pencapaian tujuan yang perlu diutamakan adalah kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diunggah pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD) secara akurat, tepat waktu dan tepat isi sesuai dengan

sistematika penulisan dan substansi pelaporan. Dukungan APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditingkatkan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah sehingga LPPD yang diunggah pada SILPPD bisa mencapai target kinerja Kepala Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT secara terukur setiap tahun anggaran.

b. Integrasi

Integrasi yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana urusan pemerintahan dalam menerjemahkan rumusan indikator kinerja kunci sehingga data yang dikumpulkan mampu menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi NTT yang tertuang dalam LPPD. Peningkatan kemampuan melalui bimbingan teknis perlu dilakukan secara rutin setiap tahun menyesuaikan dengan perubahan mutasi pejabat yang menangani LPPD. Selain peningkatan kemampuan Perangkat daerah, kemampuan tim reviu dalam proses verifikasi dan penilaian data dasar juga perlu diperdalam melalui bimbingan teknis bagi tim Reviu. Bimtek bagi Tim Reviu dibutuhkan agar mampu menganalisis Catatan Hasil Reviu (CHR) LPPD sehingga bisa ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah dan tim penyusun guna menghasilkan LPPD Provinsi NTT yang berkualitas. Sedangkan komunikasi antara tim Penyusun dengan Tim Pusat selaku instansi pemberi

tugas perlu ditingkatkan secara profesional melalui bimbingan teknis ataupun zoom terbatas, sehingga mampu menjembatani kebutuhan daerah secara akurat, cepat dan tepat.

c. Adaptasi

Proses penyesuaian terhadap penerapan SILPPD secara online perlu ditingkatkan keselarasan antara Tim Penyusun, Tim Pereviu serta Perangkat Daerah pelaksana urusan melalui evaluasi dan monitoring pelaksanaan LPPD pada setiap akhir tahun. Evaluasi difokuskan pada ketepatan sistematika pelaporan dan substansi pelaporan sedangkan monitoring pelaksanaan LPPD difokuskan pada penyampaian kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi perangkat daerah selama menyusun dan melaporkan capain kinerja perangkat daerah pelaksana urusan. Hasil evaluasi dan monitoring diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya startegis dalam peningkatan kualitas LPPD Provinsi NTT di tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Edy Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Kencana Prenada Media Group
- Etzioni, Amitai, et al. 1985, *Organisasi-Organisasi Modern*, UI Press, Jakarta.
- Indrayani, Evi, Humdiana. 2009. *Sistem Informasi Manajemen: Mempersiapkan Pekerja Berbasis Pengetahuan dalam Mengelola Sistem Informasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kadir, Abdul. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi, 2014.
- Komaruddin Sastradipoera, (1994), *Pengantar Manajemen Perusahaan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Laudon, L. d. (2018). Sistem Informasi. Library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- O'Brien, James A. *Pengantar Sistem Informasi Perseptif Bisnis dan Manajerial*. Salemba, 2005.
- Siagian, Sodang P. 2000. *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi aksara.
- Steers.M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Ahli Bahasa Magdalena)*. Jakarta. Erlangga
- Sugiyono. 2000. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.



Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Sugiyono.2019.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta

Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

### **INTERNET :**

<https://www.sidoarjo.go.id/LPPD>

### **JURNAL :**

Fitriasari, Debby, Martani, Dewi., & Khairurizka, Rahfiani. (2013). Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 Terhadap PP No.3/2007. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sasatra, Artitektur & Teknik Sipil). Bandung

## **SKRIPSI dan THESIS**

Pradipta Hakiki, Ariandi, (2017). Sistem Informasi Manajemen Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIMLPPD).

Yenny C.M.Izacc. (2013). Akuntansi Kinerja (Study Kasus Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013). Thesis. Universitas Nusa Cendana.

### **Pedoman Wawancara:**

#### **A. Pencapaian tujuan:**

1. Bagaimana proses penyusunan LPPD?
2. Bagaimana tahap penginputan dokumen pendukung pada SILPPD?
3. Apa saja data yang di unggah pada SILPPD?
4. Apa tujuan dari penggunaan SILPPD?

#### **B. Integrasi**

1. Apakah tim penyusun sudah mendapatkan bimtek tentang penyusunan LPPD?
2. Apakah tim penyusun pernah melakukan sosialisasi ?
3. Apakah tim penyusun sudah memahami tentang penyusunan LPPD dan proses unggah data dukung IKK pada SILPPD?
4. Apakah tim reviu sudah pernah mengikuti bimtek?
5. Apakah OPD/perangkat daerah Menggunakan SILPPD?

#### **C. Adaptasi**

1. Apakah tim penyusun mampu menyelesaikan penyusunan LPPD dari manual ke SILPPD?
2. Apakah sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaporan LPPD pada SILPPD?
3. Bagaimana proses reviu LPPD pada SILPPD?
4. Apakah ada masalah atau kendala yg dihadapi selama menggunakan SILPPD?

## LAMPIRAN



*Wawancara bersama Pegawai Biro Pemerintahan sub bagian OTDA*



*Wawancara Bersama kasubag PDE biro organisasi*



*Wawancara bersama Kasubag PDE Badan Kepegawaian Daerah*



*Wawancara bersama Pegawai Inspektorat daerah Provinsi NTT*



*Wawancara bersama Kasubag PDE BAPPEDA*





## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194

Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang 85225 – Timor - NTT

Nomor : 99/WM.H4.FISIP/N/V/2023  
Lampiran : 1  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth. : Kepala Biro Pemerintahan SETDA Provinsi NTT  
Di-  
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang atas nama :

Nama : Bernadeta Christina Meo Lina  
No. Regis : 421 19 039  
Fakultas/Prodi : FISIP Unwira/Administrasi Publik  
Judul : Efektifitas Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi kasus pada sub bagian otonomi Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT).

maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas diperkenankan untuk melakukan penelitian pada instansi/tempat yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik dihaturkan limpah terima kasih.

Kupang, 24 Mei 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Frans Bapa Tokan, MA

